

Kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Arif Budiman¹ Firmansyah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima
Korespondensi Penulis : arif.budiman@universitasmbojobima.ac.id

Abstract *The purpose of this study is to determine the contribution of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Bima District in the Regional Medium-Term Development Plan. This research was conducted at the BAPPEDA Office of Bima District. The research subjects were selected through purposive sampling, and the subjects/informants in this research were the Head of BAPPEDA. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the implementation of the roles and functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in the development planning in Bima District can be concluded as follows: the implementation of BAPPEDA functions in Bima District is categorized as not yet good but still sufficient. This means that the implementation of BAPPEDA functions may encounter various obstacles or hindrances in carrying out its functions and programs, which identifies that the implementation of the functions of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in development planning in Bima District should always evaluate the implementation.*

Keywords: *Contribution, BAPPEDA, Development, Region"*

Abstraksi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bima. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bima diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda. Berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu : dalam pelaksanaan fungsi Bappeda di Kabupaten Bima dikategorikan masih belum bisa dikatakan baik tetapi masih cukup. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda tidak menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan, hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bima harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan.

Kata Kunci: Kontribusi, Bappeda, Pembangunan, Daerah

PENDAHULUAN

Sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan dalam struktur manajemennya secara historis. Ini terbukti dengan perubahan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan harus dibuat agar pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dengan demikian, di setiap daerah otonom dibentuk badan yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), seperti yang terlihat di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu tugas utama dan fungsi BAPPEDA di Kabupaten Bima adalah berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Accepted Oktober 30, 2023

* Arif Budiman, arif.budiman@universitasmbojobima.ac.id

pemerintah daerah, yang dikelola langsung oleh bupati dan diawasi secara internal oleh inspektorat. Ini sangat penting mengingat pembangunan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bima belum merata dan maksimal.

Perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh pelaksanaan pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dan dinamis. Selain itu, tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Bupati Bima dilantik dengan visi dan misi yang baru, RPJMD yang baru disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Selain itu, RPJMD merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah. Dalam proses ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas koordinasi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang juga disebut sebagai Kepala Badan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran adalah elemen dinamis kedudukan (status), dan seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengannya. Setiap orang dalam sebuah organisasi memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh organisasi atau lembaga tertentu. Namun, peran, menurut Gibson Invancevich dan Donnelly (2002), berarti bekerja dengan sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Menurut Riyadi (2013:238), peran dapat didefinisikan sebagai orientasi dan pemahaman tentang peran yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Pelaku, baik individu maupun organisasi, akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya karena peran tersebut. Selain itu, peran dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diberikan secara struktural, seperti norma-norma, harapan, tabu, dan tanggung jawab. Di mana terdapat banyak tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan membantu mereka menjalankan tugas organisasi mereka. Perilaku kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran dikenal sebagai peran. Selain itu, hakikatnya peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang yang bekerja di posisi tertentu. Pribadi seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dimainkan. Semua pimpinan di tingkat atas, menengah, dan bawah akan melakukan tugas yang sama.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu tindakan yang membatasi seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati untuk memungkinkan mereka melakukannya dengan sebaik mungkin.

Peranan BAPPEDA

Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang menangani penelitian dan perencanaan pembangunan. Dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah kepada gubernur, bupati, atau walikota. Penting bagi badan ini untuk membantu gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan pemerintahan lokal dalam hal penelitian dan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan programnya, BAPPEDA Kabupaten Bima bergantung pada rencana strategi dan program prioritas untuk 5 (lima) tahun ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Bima dari bulan Juni hingga Juli 2022. Lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*, adapun subyek/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, teknik terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan ini berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan elemen pelaksanaan kebijakan yang relevan. Mereka juga merupakan perbedaan ekspektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai berdasarkan data ini dengan kinerja yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi saat perencanaan dibuat. Tujuan dari penciptaan masalah pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah sebelumnya. Identifikasi Masalah Pembangunan Daerah dari Sudut pandang Manajemen Urusan Pemerintahan .

Aspek Pendidikan

Masalah pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan Sektor pendidikan meliputi Pendidikan belum merata di seluruh kota, Pekerjaan guru harus didistribusikan secara merata berdasarkan bidang kompetensi, Sistem pendidikan anak usia dini (PAUD) kurang terorganisir, Masih ada siswa usia sekolah yang belum memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah menengah setelah berusia 12 tahun.

Aspek Kesehatan

Masalah pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan Sektor kesehatan meliputi, Angka harapan untuk kelangsungan hidup masyarakat, Balita yang kekurangan nutrisi, Jumlah kematian bayi yang dilahirkan, Jumlah bayi yang mati, Pelayanan medis untuk ibu hamil Ibu melahirkan bayi, balita, Masih diperlukan peningkatan cakupan perawatan persalinan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman dalam kebidanan. Jumlah balita dengan gizi buruk yang mendapat perawatan perlu ditingkatkan, serta jumlah penemuan dan perawatan penderita TBC BTA. Peningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan bersih. Standarisasi diperlukan karena kualitas pelayanan kesehatan relatif belum merata. Jumlah kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular cenderung meningkat. Angka kesakitan lansia masih tinggi Target imunisasi ibu hamil dan bayi masih belum tercapai. Infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai masih diperlukan.

Aspek Pekerjaan Umum

Masalah pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan Sektor pekerjaan umum meliputi; Kondisi jalan kota yang tidak memadai dalam meningkatkan konektivitas dengan jalan provinsi dan nasional untuk mendukung lokasi strategis dan potensial , Karena peningkatan arus lalu lintas, jembatan harus dibangun dengan lebar yang memadai dan dirancang dengan aman dan nyaman, Kebutuhan untuk menambah jaringan irigasi untuk meningkatkan layanan pertanian, Sanitasi lingkungan permukiman masih menjadi masalah, Perbaikan sistem drainase kota untuk mengurangi penggunaan air

Aspek Perumahan

Masalah pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan sektor perumahan meliputi; Kebutuhan masyarakat akan air bersih belum terpenuhi sepenuhnya. , Kebutuhan akan lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman , Persentase rumah yang layak huni masih sangat kecil.

Aspek Tata Ruang

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan Sektor tata ruang meliputi; Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dirilis, tetapi hanya untuk

rencana detailnya (RDTL), sehingga belum ada acuan yang sah tentang pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya masih kurang, Pergeseran lahan pertanian menjadi permukiman masih sering terjadi.

Aspek Perencanaan Pembangunan

Beberapa masalah dengan perencanaan pembangunan meliputi, Dokumen perencanaan RPJPD telah disahkan menjadi Perda. Perencanaan pembangunan lintas sektoral masih kurang terkoordinasi dan sinkronisasi. Banyak penelitian yang dapat membantu perencanaan pembangunan masih kurang. Data yang tersedia untuk membantu perencanaan pembangunan masih belum memadai.

Aspek Perhubungan

Urusan Urusan perhubungan menghadapi masalah pembangunan seperti, Sistem pengawasan kelaikan kendaraan angkutan masih kurang efektif. Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang perawatan fasilitas perhubungan Rambu-rambu dan sarana prasarana perhubungan lainnya diperlukan untuk mengikuti pembangunan jalan baru. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas

Aspek Lingkungan Hidup

Beberapa masalah pembangunan yang terkait dengan lingkungan hidup adalah sebagai berikut, Perubahan struktur lingkungan disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Tidak ada sistem penanganan sampah yang terintegrasi Tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup untuk setiap satuan penduduk. Kebutuhan untuk menyebarkan undang-undang lingkungan Pengawasan limbah belum memadai. Pelaksanaan penetapan status mutu air gagal. Sistem pengendalian kemungkinan sumber pencemaran air belum berjalan sepenuhnya. Kualitas air sungai dan danau belum dipantau secara berkala selama musim hujan dan kemarau.

Aspek Pertanahan

Beberapa masalah pembangunan terkait pertanahan adalah sebagai berikut, Perebutan hak kepemilikan tanah terus terjadi. Masyarakat kurang menyadari pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Status kepemilikan yang sah masih diperlukan untuk banyak lahan.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi oleh sektor kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut, Sebagian besar penduduk masih belum memiliki kartu identitas. Database kependudukan tidak valid karena banyak penduduk yang memiliki KTP ganda tetapi

tidak terdaftar. Tingkat kepemilikan akte kelahiran bayi masih rendah, Banyak masyarakat masih belum melaporkan kematian, yang berdampak pada perubahan populasi.

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut, Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah secara kuantitas dan kualitas. Pengawasan yang kurang terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan Pengawasan pekerja anak belum diintensifkan.

Aspek Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Menghadapi masalah pembangunan, seperti kesehatan reproduksi Sosial Urusan sosial menghadapi masalah pembangunan seperti, Penyandang masalah kesejahteraan sosial belum dilayani dengan baik, Belum semua PMKS menerima bantuan sosial.

Aspek Ketenagakerjaan

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi dalam pekerjaan termasuk: Tingkat partisipasi pekerja lokal masih rendah; Tidak cukup lapangan kerja, sehingga banyak penduduk lokal harus bekerja di luar daerah; Pekerja memiliki tingkat keterampilan dan keahlian yang relatif rendah di beberapa industri.

Aspek Koperasi dan UMKM

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM meliputi: Jumlah koperasi yang aktif masih sangat sedikit; Sumber daya koperasi belum dioptimalkan; Bantuan untuk memperkuat koperasi masih sangat sedikit

Aspek Penanaman Modal

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi oleh sektor penanaman modal adalah sebagai berikut, Laju pertumbuhan angka realisasi PMDN tidak stabil setiap tahun; ada kenaikan dan penurunan yang signifikan. Belum tercipta infrastruktur yang menarik investor. Masih ada kurangnya kerja sama antara instansi yang mendukung investasi, Aturan investasi masih ambigu.

Aspek Budaya

Urusan budaya menghadapi masalah pembangunan seperti, Di era globalisasi saat ini, masyarakat telah mengalami banyak perubahan budaya. Belum adanya upaya yang serius dari pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan kekayaan budaya. Masih kurangnya sarana untuk menyelenggarakan aktivitas seni dan budaya.

Aspek Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi dalam bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut, Masih banyak sumber daya anak muda yang potensial yang

belum dieksplorasi dan dimanfaatkan. Tidak adanya tempat untuk kegiatan pemuda. Lapangan olahraga yang belum tersedia

Aspek Kesbang dan Politik

Beberapa masalah pembangunan yang dihadapi terkait dengan kesbang dan politik adalah sebagai berikut, Kegiatan lintas agama belum dilakukan secara teratur. Koordinasi agama belum efektif. Kegiatan pembinaan untuk LSM belum berjalan dengan baik. Ada peningkatan dalam jumlah orang yang menggunakan narkoba. Kurang pemahaman masyarakat tentang bahaya obat

Aspek Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menghadapi banyak masalah pembangunan, termasuk: Sistem informasi manajemen pemerintah kurang digunakan. Indeks kepuasan layanan masyarakat yang masih rendah Pemekaran wilayah kelurahan belum ditangani dan dipersiapkan dengan matang.

Aspek Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan ketahanan pangan meliputi Ketersediaan bahan pangan untuk penduduk lokal belum terpenuhi, masih tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah ; Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi dan keamanan pangan; Pelatihan dan penyuluhan petani belum berjalan secara efektif dan efisien

Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi, Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat Desa masih tertinggal jauh dibandingkan aparatur pemerintah instansi lainnya ; Pendidikan dan pelatihan aparat desa untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat belum memadai; Masih rendahnya sumberdaya manusia pada tingkat pengetahuan aparat terhadap sistem pemerintahan desa

Aspek Kearsipan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kearsipan meliputi, Penerapan pengelolaan arsip secara baku belum berjalan dengan baik; Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petugas pengelolaan kearsipan

Aspek Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika meliputi, Pemerintah belum memiliki fasilitas resmi informasi perkotaan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat atau pun turis dari mancanegara di lokasi-lokasi tertentu, Belum tersosialisasinya program-program pemerintah dengan baik, Masih lemahnya

pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; Belum tersedianya infrastruktur dan aplikasi dasar teknologi informasi

Aspek Perpustakaan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perpustakaan meliputi, Masih rendahnya kuantitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; Kesadaran masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan dan membaca buku terus menurun akibat kemajuan teknologi informasi via internet

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bima diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda. Berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu : dalam pelaksanaan fungsi Bappeda di Kabupaten Bima dikategorikan masih belum bisa dikatakan baik tetapi masih cukup. Artinya bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda tidak menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan, hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bima harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson. 2002. Organisasi Perilaku-struktur proses, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Husaini, Purnomo. 2009. Metodologi penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta.
- Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Sumber-sumber Lain:
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Bupati Bima Nomor 5 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bima tahun 2021-2026.